

Demokrasi Pancasila Sebagai Fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Siti Sovia*¹

Alya Syafika Fitri²

Pausan Asima³

M. Kurniawan Syaputra⁴

Haryanti Sapitri Yanti⁵

Hamdi Abdullah Hasibuan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Riau, Indonesia

*e-mail: Siti.sovia5117@student.unri.ac.id¹, alya.syafika5173@student.unri.ac.id², pausan.asima5169@student.unri.ac.id³, m.kurniawan4175@student.unri.ac.id⁴, haryanti.sapitri5108@student.unri.ac.id⁵, hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id⁶

Abstrak

Artikel ini membahas peran Demokrasi Pancasila sebagai landasan utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai serangkaian nilai yang mengikat seluruh elemen masyarakat dalam keragaman, sehingga memperkuat persatuan bangsa. Penekanan pada pentingnya Demokrasi Pancasila dalam konteks NKRI diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fondasi negara dan peranannya dalam menjaga integritas bangsa.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Fondasi, Sistem politik dan Kedaulatan rakyat

Abstract

This article discusses the role of Pancasila Democracy as the main foundation in maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The method used is literature study and qualitative analysis of various relevant sources. The results show that Pancasila Democracy not only functions as a political system, but also as a series of values that bind all elements of society in diversity, thus strengthening national unity. It is hoped that the emphasis on the importance of Pancasila Democracy in the context of the Republic of Indonesia can provide a deeper understanding of the foundations of the state and its role in maintaining the integrity of the nation.

Keywords: Pancasila Democracy, Unitary State of the Republic of Indonesia, Foundation, Political System and People's Sovereignty

PENDAHULUAN

Tantangan utama yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi yang semakin kompleks. Meskipun Pancasila telah menjadi landasan ideologis bangsa, implementasinya dalam sistem demokrasi sering kali menghadapi hambatan, baik karena perbedaan interpretasi maupun dinamika politik yang tidak stabil. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep Demokrasi Pancasila dan bagaimana perkembangannya dalam sejarah politik Indonesia. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman.

Artikel ini akan mengkaji sejauh mana Demokrasi Pancasila berperan dalam menjaga persatuan nasional, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang terjadi. Rumusan masalah yang diangkat bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas penerapan Demokrasi Pancasila dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan mengkaji lebih dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks politik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mendukung stabilitas politik dan sosial NKRI, sehingga kesatuan bangsa tetap terjaga dalam jangka panjang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan analisis data sekunder, yang melibatkan sumber-sumber akademis, dokumen sejarah, serta hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Demokrasi Pancasila dalam menjaga kesatuan bangsa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara (Karsa dan Rohani 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan analisis data sekunder, yang melibatkan sumber-sumber akademis, dokumen sejarah, serta hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Demokrasi Pancasila dalam menjaga kesatuan bangsa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

PEMBAHASAN

Konsep Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang secara unik diadopsi oleh Indonesia, berdasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara. Konsep ini berakar pada kepribadian dan filosofi hidup bangsa Indonesia, yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat sebagai elemen utama, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin serta ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih berfokus pada kebebasan individu dan hak asasi manusia, Demokrasi Pancasila lebih menekankan pentingnya kesatuan sosial dan menghindari perpecahan antara mayoritas dan minoritas.

Prinsip utama Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang melekat dalam budaya Indonesia. Sistem ini tidak mengenal adanya oposisi politik, dan lebih mengutamakan keselarasan antara hak dan kewajiban individu dengan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, Demokrasi Pancasila bertujuan menciptakan harmoni sosial melalui pendekatan yang inklusif, berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih kompetitif dan sering mengutamakan kepentingan individu. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila bukan hanya sebuah sistem politik, tetapi juga merupakan wujud dari identitas nasional yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia (Ratri Yulia Ningsih, Romi Dian Sari 2023).

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi Pancasila

Proses perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi, dengan Pancasila sebagai fondasi utamanya. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Pancasila diadopsi sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur dan mencerminkan identitas bangsa. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman utama dalam membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap keputusan politik harus diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat.

Perjalanan demokrasi Indonesia diwarnai oleh berbagai peristiwa penting, termasuk pengesahan UUD 1945 dan dinamika politik pada masa Orde Baru, di mana meskipun ada upaya untuk memusatkan kekuasaan, prinsip-prinsip Pancasila tetap dijadikan panduan dalam proses politik. Perubahan besar terjadi pada era reformasi akhir 1990-an, yang ditandai dengan dorongan kuat untuk demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Pancasila terus berperan sebagai pedoman dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif

dan berkeadilan sosial, mencerminkan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia (Legowo, Krisnad dan Sumartono 2013)

Dengan demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia tidak hanya sebatas perubahan politik, tetapi juga proses pembelajaran dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ini termasuk prinsip musyawarah, perlindungan hak asasi manusia, dan penghargaan terhadap keragaman sebagai bagian dari identitas nasional. Pancasila menjadi elemen penting yang memperkuat integrasi sosial dan menjaga keutuhan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan budaya (Rohim 2023).

Demokrasi Pancasila sebagai Fondasi Negara Kesatuan

Demokrasi Pancasila berfungsi sebagai pilar utama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas politik serta sosial di tengah keragaman yang kaya di negara ini. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya mencerminkan nilai-nilai luhur yang dipegang oleh bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konsep ini berakar dari kepribadian dan filosofi hidup masyarakat Indonesia, seperti yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945.

Salah satu ciri khas Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, di mana pengambilan keputusan politik dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan rakyat dapat terwakili dengan adil. Selain itu, nilai-nilai Pancasila, seperti semangat kekeluargaan dan gotong royong, berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan masyarakat beragam di Indonesia. Dengan mengedepankan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak minoritas, Demokrasi Pancasila berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial serta stabilitas politik yang diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi interaksi sosial dan politik di Indonesia. Dengan menekankan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan, Demokrasi Pancasila mampu menghindari konflik yang sering terjadi dalam sistem demokrasi lain yang lebih bersifat kompetitif. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif, sehingga memperkuat integrasi nasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, terutama di tengah keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia (Ahmad Rayhan dan Nida 2024).

Tantangan dan Peluang Demokrasi Pancasila

Penting untuk membahas tantangan dan peluang dalam penerapan Demokrasi Pancasila di era modern, terutama terkait dengan isu globalisasi, ekstremisme, dan disinformasi. Globalisasi memiliki dua sisi; di satu sisi, ia menawarkan akses informasi yang lebih luas serta pertukaran budaya yang bermanfaat. Namun, di sisi lain, globalisasi dapat mengancam nilai-nilai lokal dan identitas nasional. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh budaya asing juga berpotensi melemahkan nilai-nilai lokal serta semangat nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda.

Ekstremisme menjadi tantangan signifikan bagi penerapan Demokrasi Pancasila. Ideologi yang menolak prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman sering berkembang di kalangan mahasiswa dan generasi muda, yang dapat menciptakan potensi perpecahan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila menjadi sangat penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi muda. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang Pancasila, tetapi juga untuk membentuk karakter individu yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis (Ahmad Rayhan dan Nida 2024).

Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk memperkuat identitas nasional melalui Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan zaman,

masyarakat dapat bersatu dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Pancasila dapat berfungsi sebagai identitas nasional yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Melalui pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, individu akan mampu mengembangkan rasa tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan toleransi—nilai-nilai yang sangat penting untuk menjaga integrasi sosial dan menghindari perpecahan.

Secara keseluruhan, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Demokrasi Pancasila di era modern, peluang untuk memperkuat identitas nasional juga sangat banyak. Dengan memanfaatkan pendidikan sebagai sarana untuk menyebarkan dan menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan globalisasi dan ekstremisme dengan lebih bijak dan terarah. Dengan demikian, penerapan Pancasila dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial dan politik di Indonesia (Aulia, Dewi, dan Furnamasari 2021).

Peran Masyarakat dalam Demokrasi Pancasila

Keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan politik di Indonesia. Pendidikan demokrasi menjadi salah satu kunci utama dalam membentuk karakter dan sikap warga negara yang demokratis. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *Edu Society*, pendidikan demokrasi harus dimulai sejak dini di sekolah, di mana siswa diajarkan tentang nilai-nilai seperti kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan proses-proses demokrasi seperti pemilihan umum dan partisipasi dalam debat (Prabowo 2023).

Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mencakup beberapa langkah. Pertama, pendidikan demokrasi perlu diperkuat melalui kurikulum yang relevan di sekolah-sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendorong penguatan literasi kewargaan untuk membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kedua, media massa yang independen harus didorong untuk menyediakan informasi yang akurat dan objektif, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dalam konteks politik. Ketiga, akses informasi mengenai kebijakan publik dan proses politik harus diperluas agar masyarakat lebih terlibat dalam sistem demokrasi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif, diharapkan masyarakat Indonesia dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan demokrasi. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mampu memilih pemimpin yang berkualitas, mempertahankan hak-haknya, serta memerangi korupsi dan intoleransi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi adalah esensial untuk menciptakan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil di Indonesia (Sihono 2017).

Kesimpulan dan Saran

Demokrasi Pancasila berperan sebagai fondasi yang kuat dalam menjaga integritas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai sebuah sistem politik yang unik, Demokrasi Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengedepankan musyawarah, persatuan, dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam konteks keragaman sosial dan budaya Indonesia, di mana penerapan nilai-nilai tersebut dapat mencegah perpecahan dan memperkuat stabilitas politik serta sosial. Dengan mengedepankan dialog dan kerja sama, Demokrasi Pancasila membantu membangun rasa saling menghargai antar kelompok masyarakat.

Namun, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, Demokrasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk ekstremisme dan disinformasi. Ancaman-ancaman ini dapat merusak tatanan sosial dan politik yang telah dibangun. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang mengedepankan pemahaman tentang Pancasila dan pentingnya kerukunan antar umat beragama serta antar suku bangsa menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih siap menghadapi dinamika global tanpa kehilangan identitas nasional.

Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Melalui program-program yang relevan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi perlu ditanamkan sejak dini. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini tidak hanya akan memperkuat pelaksanaan demokrasi, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara.

Dengan demikian, Demokrasi Pancasila dapat terus menjadi pedoman utama dalam membangun bangsa yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan publik akan semakin memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mewujudkan cita-cita Pancasila sebagai dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui upaya bersama, Indonesia dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan terus berkembang sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila.

Saran

Untuk memperkuat penerapan Demokrasi Pancasila sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan sangat penting untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sejak dini. Selain itu, perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan program yang mendorong keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, seperti forum diskusi atau konsultasi publik. Media massa juga harus didorong untuk menyajikan informasi yang akurat dan objektif, serta menyediakan platform bagi diskusi konstruktif tentang isu-isu kebangsaan dan demokrasi.

Kampanye kesadaran sosial yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan partisipasi dalam demokrasi, terutama di kalangan generasi muda, juga sangat diperlukan. Selanjutnya, peningkatan akses informasi mengenai kebijakan publik dan proses politik yang transparan akan membantu masyarakat membuat keputusan yang terinformasi. Selain itu, penanganan ekstremisme melalui program pencegahan radikalisme dan dialog antaragama sangat penting untuk menjaga kerukunan di masyarakat. Terakhir, evaluasi dan penelitian berkelanjutan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi akan membantu menemukan solusi yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Demokrasi Pancasila dapat semakin kuat dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan, serta menjaga keutuhan NKRI.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rayhan, & Qotrun Nida. 2024. "Demokrasi Pancasila dan Penerapannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Literasi Hukum* 8(1): 69-76.
- Aulia, Lulu Rahma, Dinie Anggraeni Dewi, & Yayang Furi Furnamasari. 2021. "Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(3): 8549-57. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2355>.
- Karsa, Topan Indra, & Rohani Rohani. 2022. "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Terhadap Pemilihan Kepala Daerah". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7(2): 324-40.
- Legowo, Sivfian, Krisnadi, & Hendro Sumartono. 2013. "Dinamika Politik Rezim Orde Baru Di Indonesia". *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa* 1(1): 1-7.
- Prabowo, Nurhadi. 2023. "Urgensi Pendidikan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat". *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1): 865-71.
- Ratri Yulia Ningsih, Romi Dian Sari, Siti Tiara Maulia. 2023. "Civilia : DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI MODEL DEMOKRASI YANG RASIONAL DAN SPESIFIK". *Jurnal kajian hukum dan pendidikan kewarganegaraan* 3(1). <http://jurnal.anfa.co.id>.

Rohim, Miftahul, Linda Rahmawati, Arkan Raihan, & Saepul Rizki. 2023. "Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia". *Advanced In Social Humanities Research* 1(5): 664.

Sihono, Teguh. 2017. "Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan – Teguh Sihono". *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 8(20): 1-22.